



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN



PENETAPAN RENJA TAHUN 2025

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Rencana Kerja BPKAD Kabupaten Bangkalan Tahun 2025 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2025. Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja BPKAD Tahun 2025 dapat dikerjakan dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting BPKAD, evaluasi pelaksanaan Renja BPKAD Tahun lalu dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra BPKAD Tahun 2024-2026.

Tersusunnya Rencana Kerja BPKAD Tahun 2025 ini, disamping sebagai Dokumen Rencana Kerja, juga diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dari program/kegiatan BPKAD sebagai perangkat Daerah yang bertanggungjawab dalam bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Bangkalan, 15 Juni 2024

KEPALA BPKAD
KABUPATEN BANGKALAN



ABDUL AZIZ, S.Si
NIP. 19740729 200312 1 006

DAFTAR ISI

	HAL
Bab I Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
Bab II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023.....	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023 dan Capaian Renstra	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD	33
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKAD	39
2.4 Review Terhadap RKPD	42
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	52
Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	53
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	53
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD	57
3.3 Program dan Kegiatan	60
Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.....	62
Bab Penutup.....	72

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih riil.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis antara lain :

1. Menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah (PD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
2. Sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra PD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.
3. Renja PD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sebagai dasar pengusulan program dan kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN.
4. Dan Renja PD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

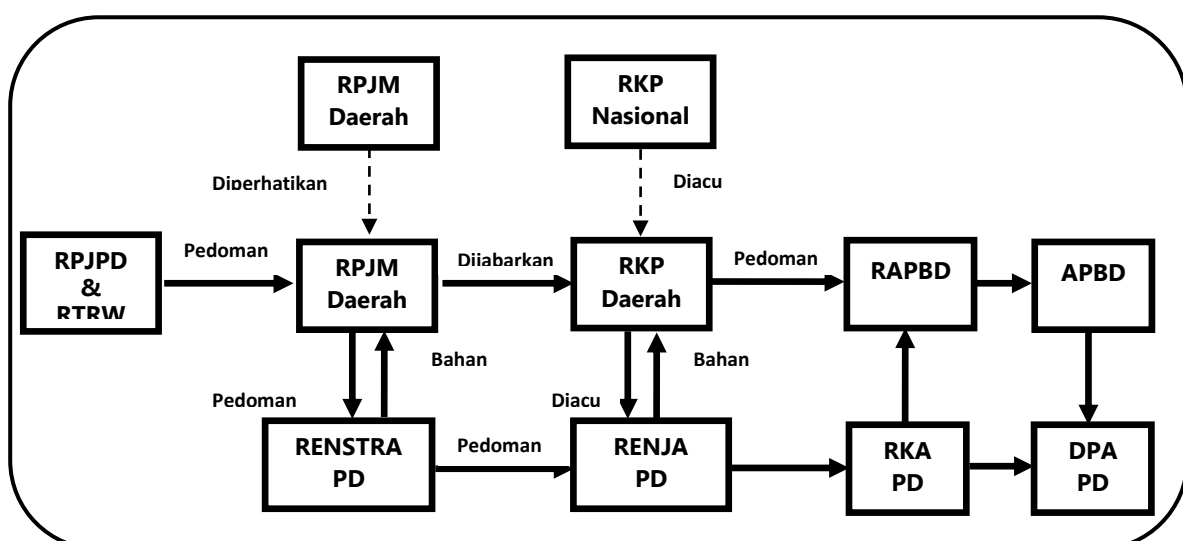
Dokumen Renja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan , Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; terdiri dari enam tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, penyusunan rancangan akhir dan penetapan. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Perangkat Daerah yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah, Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renja Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

Keterkaitan Renja BPKAD Kabupaten Bangkalan dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar 1 :

Gambar 1 Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan



RPJPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2005 - 2025 merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang menjadi acuan penyusunan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah (RPJMD). Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang akan diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua harus berkesinambungan dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang.

RPJMD Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 - 2023 merupakan tahap ketiga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005 - 2025. RPJMD tahap ketiga melanjutkan visi pembangunan jangka panjang daerah yaitu mewujudkan Kabupaten Bangkalan Sebagai Kabupaten Industri, Perdagangan dan Jasa yang Tangguh Menuju Terciptanya Masyarakat Madani. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 - 2023 disusun melalui tahapan perencanaan partisipatif dengan mengedepankan proses evaluasi, proyeksi dan analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan daerah Kabupaten Bangkalan.

RPJMD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 - 2026 yang pelaksanaannya akan dijabarkan didalam Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tahun 2024 - 2026 untuk jangka waktu 3 tahun sesuai tugas dan tupoksi BPKAD dan lebih didetailkan lagi melalui Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah setiap tahun mulai Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026. Selanjutnya Renja PD menjadi acuan untuk penyusunan RKA - PD (Rencana Kerja Anggaran PD). Muatan RKA meliputi input (dana, tenaga kerja, fasilitas, dll), kegiatan (proses) dan output/outcome.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan didasarkan pada Landasan Hukum sebagaimana berikut :

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

- c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
- d. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
- e. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5587) Perubahan terakhir Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dirubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
- i. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia nomor 5 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan dan penelaahan rencana strategis kementerian/lembaga (renstra k/l) 2015-2019
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)

- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
- n. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupate Bangkalan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 4/E);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2011 Nomor 1/D);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2014 Nomor 1/D);
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor 1/E, tambahan lembaran daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 76);
- s. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas, Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- t. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor 7/E);
- u. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 14 Seri E)
- v. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 18 Seri E)

- w. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Nomor 33 Seri E)
- x. Surat Edaran Bupati Nomor : 100.3.4.2/460/2024 tentang Pedoman penyempurnaan Rancangan awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan, antara lain :

- a. Meningkatkan konsistensi antara kebijakan, perencanaan, target capaian dengan pelaksanaannya;
- b. Meningkatkan peran partisipasi aktif pemangku kepentingan dan stake holder dalam proses penyusunan program kegiatan dan perencanaan anggaran;
- c. Menyelaraskan program, kegiatan dengan anggaran;
- d. Meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pemanfaatan sumberdaya;
- e. Meningkatkan kinerja Perangkat Daerah yang terukur sesuai dengan Renstra Perangkat Daerah.

Sedangkan, tujuannya adalah :

- a. Sinkronisasi dan menjabarkan Rencana Strategis - Perangkat Daerah kedalam program dan kegiatan pada 1 (satu) tahun anggaran;
- b. Menjadikan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan BPKAD;
- c. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas perencanaan program kegiatan dan anggaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPKAD.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renja BPKAD Kabupaten Bangkalan Tahun 2025 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tersebut di atas dibagi per Bab. sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab 2 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan RKPD/
- 2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Bab 3 Tujuan, Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Bab 4 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

4.1 Program dan Kegiatan Tahun 2024

Bab 5 Penutup

BAB II

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan permasalahan-permasalahan yang dapat menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Dari hasil evaluasi dimaksud sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkalan.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang meliputi penyusunan rancangan APBD, Penetapan APBD, Pelaksanaan APBD, Perubahan APBD, Penatausahaan APBD, Pengelolaan Aset dan Akuntansi Keuangan Daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah dan pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan fungsi pembangunan di Bidang Pemerintahan dan otonomi daerah, pada Tahun 2023 di titik beratkan pada program utama pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah meliputi 3 (tiga) Program dan 13 (dua belas) Kegiatan dengan 60 (enam puluh) Sub Kegiatan antara lain sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Dari program-program diatas, realisasi Belanja Operasi BPKAD pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 34.789.064.881,- atau 93,87%, Belanja Modal BPKAD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 567.479.679,- atau 87,81%, Belanja Tidak Terduga BPKAD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 823.475.000,- atau 41,73% dan Belanja Transfer BPKAD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 447.840.774.290,- atau 99,97% dengan rincian program dan kegiatan antara lain :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pagu Program ini sebesar Rp. 34.679.437.975,00 dan terealisasi sebesar Rp. 32.343.294.947,00 atau 93,26% yang diterjemahkan melalui kegiatan :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Pagu Kegiatan ini sebesar Rp. 75.852.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 70.020.650,- atau 92,31% dan diterjemahkan kedalam sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 10.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 10.331.250,- atau 99,34%
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 16.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 14.857.800,- atau 92,86%
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 16.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 15.769.900,- atau 98,56%%
 - d) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2309000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1577050,- atau 68,30%
 - e) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.239.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.213.000,- atau 99,20%
 - f) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 12.952.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 10.082.650,- atau 77,85%
 - g) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 14.952.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 14.189.000,- atau 94,90%

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Pagu Kegiatan ini sebesar Rp. 29.909.980.980,- dan terealisasi sebesar Rp. 28.155.693.442,- atau 94,13% dan diterjemahkan kedalam sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan pagu anggaran sebesar Rp. 29.842.861.380,- dan terealisasi sebesar Rp. 28.088.794.392,- atau 94,12%
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 34.032.300,- dan terealisasi sebesar Rp. 33.912.300,- atau 99,65%
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 33087300,- dan terealisasi sebesar Rp. 32.986.750,- atau 99,70%
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Pagu Kegiatan ini sebesar Rp. 25.881.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 24.951.400 atau 96,41% dan diterjemahkan kedalam sub kegiatan sebagai berikut:
 - a) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 5.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.682.700,- atau 93,65%
 - b) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 20.881.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 20.268.700,- atau 97,06%
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Pagu Kegiatan ini sebesar Rp. 10.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0,00% dan diterjemahkan kedalam Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - a) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 10.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0,00%
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pagu Kegiatan ini sebesar Rp. 612.476.750,- dan terealisasi sebesar Rp. 515.689.939,- atau 84,20% dan diterjemahkan kedalam Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 10.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 8.770.000,- atau 87,70%
 - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 103.885.350,- dan terealisasi sebesar Rp. 98.636.050,- atau 94,95%

- c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 43.266.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 32.557.500,- atau 75,25%
 - d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 200.570.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 165.197.000,- atau 82,36%
 - e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 6.555.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.465.000,- atau 98,63%
 - f) Fasilitas Kunjungan Tamu, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 17.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 17.461.000,- atau 99,78%
 - g) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 230.700.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 186.603.389,- atau 80,89%
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Pagu Kegiatan ini sebesar Rp. 306.512.830,- dan terealisasi sebesar Rp. 254.842.624,- atau 83,14% dan diterjemahkan kedalam Sub Kegiatan sebagai berikut :
- a) Pengadaan Aset Tetap Lainnya, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 266.507.830,- dan terealisasi sebesar Rp. 214.877.629,- atau 80,63%
 - b) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 42.194.000 dan terealisasi sebesar Rp. 38.377.925 atau 90,96%
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pagu Kegiatan ini sebesar Rp. 3.135.260.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.031.421.008,- atau 96,69% dan diterjemahkan kedalam Sub Kegiatan sebagai berikut:
- a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 5.020.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.944.500,- atau 38,74%
 - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 269.850.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 23.7240.653,- atau 87,92%
 - c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.860.390.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.792.235.855,- atau 97,62%

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pagu Kegiatan ini sebesar Rp. 603.473.615,- dan terealisasi sebesar Rp. 474.453.884,- atau 78,62% dan diterjemahkan kedalam Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 120.490.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 94.902.281,- atau 78,76%
 - b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 103.982.995,- dan terealisasi sebesar Rp. 47.072.603,- atau 45,27%
 - c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 157.551.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 148.701.000,- atau 94,38%
 - d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 221.449.620,- dan terealisasi sebesar Rp. 183.778.000,- atau 82,99%
- B. Program Pengelolaan Keuangan Daerah, Pagu Program ini sebesar Rp. 452.262.153.771,- dan terealisasi sebesar Rp. 450.807.455.053,- atau 99,68% yang diterjemahkan melalui kegiatan sebagai berikut :
 1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, Pagu Kegiatan ini sebesar Rp. 1.794.600.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.680.736.000,- atau 93,66% yang diterjemahkan melalui kegiatan sebagai berikut :
 - a. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 43.639.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 41.585.500,- atau 95,29%
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 43.639.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 41.989.100,- atau 96,22%
 - c. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 17.100.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 16.581.600,- atau 96,97%
 - d. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 11.250.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 11.113.200,- atau 98,78%

- e. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 27.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 27.350.000,- atau 99,45%
 - f. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 64.560.550,- dan terealisasi sebesar Rp. 64.240.000,- atau 99,50%
 - g. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 535.560.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 513.547.200,- atau 95,89%
 - h. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 526.089.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 520.079.800,- atau 98,86%
 - i. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 473.692.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 394.672.300,- atau 83,32%
 - j. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 37.705.450,- dan terealisasi sebesar Rp. 36.479.100,- atau 96,75%
 - k. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 9.115.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 8.781.100,- atau 96,34%
 - l. Koordinasi Perencanaan Pembiayaan Daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.750.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.317.100,- atau 90,89%
2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, Pagu Kegiatan ini sebesar Rp. 249.825.625,- dan terealisasi sebesar Rp. 23.5781.351,- atau 94,38% yang diterjemahkan melalui kegiatan sebagai berikut :
- a. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 28.935.250,- dan terealisasi sebesar Rp. 28.035.250,- atau 96,89%
 - b. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 35.334.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 33.028.000,- atau 93,47%

- c. Penatausahaan Pembiayaan Daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 22.745.250,- dan terealisasi sebesar Rp. 21.215.250,- atau 93,27%
 - d. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 54.591.025,- dan terealisasi sebesar Rp. 50.991.000,- atau 93,41%
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga(PFK) , dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.630.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.630.000,- atau 100%
 - f. Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.009.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.910.100,- atau 95,05%
 - g. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 38.400.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 36.521.751,- atau 95,11%
 - h. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 66.180.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 62.450.000,- atau 94,36%
3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Pagu Kegiatan ini sebesar Rp. 261.148.450,- dan terealisasi sebesar Rp. 226.688.412,- atau 86,80% yang diterjemahkan melalui kegiatan sebagai berikut:
- a. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 24.711.750,- dan terealisasi sebesar Rp. 21.552.160,- atau 87,21%
 - b. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dengan pagu anggaran sebesar

Rp. 103.131.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 86.557.398,- atau 83,93%

- c. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 88.127.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 80.339.544,- atau 91,16%
 - d. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 45.177.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 38.239.310,- atau 84,64%
4. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Pagu Kegiatan ini sebesar Rp. 449.956.579.696,- dan terealisasi sebesar Rp. 448.664.249.290,- atau 99,71% yang diterjemahkan melalui kegiatan sebagai berikut :
- a. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 440.307.596.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 440.165.145.170,- atau 99,97%
 - b. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.973.353.876,- dan terealisasi sebesar Rp. 823.475.000,- atau 41,73%
 - c. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 7.675.629.120,- dan terealisasi sebesar Rp. 7.675.629.120,- atau 100%
- C. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pagu Program ini sebesar Rp. 721.899.136,- dan terealisasi sebesar Rp. 686.265.850,- atau 95,06% yang diterjemahkan melalui kegiatan sebagai berikut :
1. Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pagu Kegiatan ini sebesar Rp. 721.899.136,- dan terealisasi sebesar Rp. 686.265.850,- atau 95,06% yang diterjemahkan melalui kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyusunan Standar Harga, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 225.848.300,- dan terealisasi sebesar Rp. 223.597.300,- atau 99,00%
 - b. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 379.761.636,- dan terealisasi sebesar Rp. 352.602.050,- atau 92,85%

- c. Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 34.342.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 32.514.000,- atau 94,68%
- d. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 81.946.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 77.552.500,- atau 94,64%

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2024
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (pada akhir periode Renstra PD) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d tahun (n-3) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)						Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Perubahan Renstra Tahun 2018-2023 s/d tahun berjalan				
							Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023		Tingkat Realisasi (%) 2023			Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2024		
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10 = (5+7+9)		11 =(10/4)*100	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase terpenuhinya Penunjang urusan pemerintahan	100%	124,602,455,923	100%	76,614,098,627	100%	34,674,417,975	100%	32,525,128,447	100%	88%			100%	109,139,227,074	100%	72%
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi PD yang tersusun tepat waktu	100%	672,103,200	100%	292,665,700	100%	75,852,000	100%	70,020,650	100%	92.3%			100%	362,686,350	100%	54%
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	12	98,790,800	8	55,853,050									8	55,853,050	67%	57%
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2	10,400,000	2	10,331,250	100%	99.3%			2	10,331,250	17%	10%
5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun	6	96,234,400	4	57,970,900									4	57,970,900	67%	60%
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					1	16,000,000	1	14,857,800	100%	92.9%			1	14,857,800	17%	15%
5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun	6	96,234,400	4	47,131,900									4	47,131,900	67%	49%
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					1	16,000,000	1	15,769,900	100%	98.6%			1	15,769,900	17%	16%
5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA-SKPD yang tersusun	6	96,234,400	4	26,182,400									4	26,182,400	67%	27%
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					1	2,309,000	1	1,577,050	100%	68.3%			1	1,577,050	17%	2%
5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersusun	6	96,234,400	4	27,025,500									4	27,025,500	67%	28%
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD					1	3,239,000	1	3,213,000	100%	99.2%			1	3,213,000	17%	3%
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersusun	7	124,370,400	4	46,665,300									4	46,665,300	57%	38%

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (pada akhir periode Renstra PD) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d tahun (n-3) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)						Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Perubahan Renstra Tahun 2018-2023 s/d tahun berjalan			
							Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023		Tingkat Realisasi (%) 2023				Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2024	
							6		7		8 = (7/6)				10 = (5+7+9)		11 =(10/4)*100	
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10 = (5+7+9)		11 =(10/4)*100	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					6	12,952,000	6	10,082,650	100%	77.8%			6	10,082,650	86%	8%
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	24	64,004,400	16	31,836,650		-							16	31,836,650	67%	50%
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					8	14,952,000	8	14,189,000	100%	94.9%			8	14,189,000	33%	22%
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan Administrasi Keuangan PD terlayani secara tepat waktu	100%	107,923,945,868	100%	66,780,880,205	100%	29,909,980,980	100%	28,155,693,442	100%	94%			100%	94,936,573,647	100%	88%
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang dibayarkan tunjangan dan gajinya	1	107,656,884,868	100%	66,654,292,255									100%	66,654,292,255	100%	62%
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					51	29,842,861,380	51	28,088,794,392	100%	94.1%			51	28,088,794,392	100%	26%
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun	6	201,805,800	4	82,866,750									4	82,866,750	67%	41%
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					2	34,032,300	2	33,912,300	100%	99.6%			2	33,912,300	33%	17%
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan PD yang tersusun Mingguan/Bulanan/ Triwulanan/Semesteran	12	65,255,200	8	43,721,200									8	43,721,200	67%	67%
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					4	33,087,300	4	32,986,750	100%	99.7%			4	32,986,750	33%	51%
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase barang milik daerah pada PD yang teradministrasi dengan baik	100%	80,000,000	100%	49,403,550	100%	25,881,800	100%	24,951,400	100%	96.4%			100%	74,354,950	100%	93%
5.02.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen rencana kebutuhan BMD yang tersusun	3	40,000,000	2	23,565,850									2	23,565,850	67%	59%
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					1	5,000,000	1	4,682,700	100%	93.7%			1	4,682,700	33%	12%
5.02.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah rekonsiliasi; jumlah laporan BMD yang tersusun	42	40,000,000	28	25,837,700									28	25,837,700	67%	65%

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (pada akhir periode Renstra PD) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d tahun (n-3) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)						Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Perubahan Renstra Tahun 2018-2023 s/d tahun berjalan						
							Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023		Tingkat Realisasi (%) 2023			Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2024				
			1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10 = (5+7+9)		11 =(10/4)*100
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Jumlah Laporan Rekonsiliasidan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					14	20,881,800	14	20,268,700	100%	97.1%			14	20,268,700	33%	51%		
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang terlayani	100%	601,357,255	100%	174,951,451	100%	50,005,000	97%	39,964,995	97%	79.9%			99%	214,916,446	99%	36%		
5.02.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarana dan prasarana disiplin Pegawai yang terpenuhi	210	242,350,000	70	30,150,000									70	30,150,000	33%	12%		
		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai													0	-	0%	0%		
5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Aparatur yang diadakan	210	41,536,719											0	-	0%	0%		
		Jumlah Paket Pakaian Dinas besertaAtribut Kelengkapan					70	40,005,000	70	39,964,995	100%	99.9%			70	39,964,995	33%	96%		
5.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah (variabel) data administrasi kepegawaian yang diolah	3	47,470,536	1	17,801,451									1	17,801,451	33%	38%		
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian													0	-	0%	0%		
5.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Keikutsertaan Peserta Bintek	210	200,000,000	85	115,000,000									85	115,000,000	40%	58%		
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsiyang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					2	10,000,000			100%	99.9%			0	-	0%	0%		
5.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Sosialisai perundangan	140	70,000,000	70	12,000,000									70	12,000,000	50%	17%		
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan													0	-	0%	0%		
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tepat waktu/ sesuai standar/ ketentuan	100%	2,007,393,800	100%	1,259,730,922	100%	612,476,750	100%	515,689,939	100%	84%			100%	1,775,420,861	100%	88%		
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	150	48,578,600	100	28,667,975									100	28,667,975	67%	59%		
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					4	10,000,000	4	8,770,000	100%	87.7%			4	8,770,000	3%	18%		
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3	225,757,400	2	174,747,450									2	174,747,450	67%	77%		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					18	103,885,350	18	98,636,050	100%	94.9%			18	98,636,050	600%	44%		

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (pada akhir periode Renstra PD) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d tahun (n-3) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)						Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Perubahan Renstra Tahun 2018-2023 s/d tahun berjalan						
							Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023		Tingkat Realisasi (%) 2023			Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2024				
			1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10 = (5+7+9)		11 =(10/4)*100
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	6	215,232,000	4	89,200,000									4	89,200,000	67%	41%		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1	43,266,000	1	32,557,500	100%	75.2%			1	32,557,500	17%	15%		
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Kantor yang disediakan	3	529,566,400	2	323,184,200									2	323,184,200	67%	61%		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1	200,570,400	1	165,197,000	100%	82.4%			1	165,197,000	33%	31%		
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	3	25,920,000	2	16,020,000									2	16,020,000	67%	62%		
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					1	6,555,000	1	6,465,000	100%	98.6%			1	6,465,000	33%	25%		
5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi	3	53,600,000	2	37,468,800									2	37,468,800	67%	70%		
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					4	17,500,000	4	17,461,000	100%	99.8%			4	17,461,000	133%	33%		
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah yang dilaksanakan	250	749,216,000	200	505,978,422									200	505,978,422	80%	68%		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					4	230,700,000	4	186,603,389	100%	80.9%			4	186,603,389	2%	25%		
5.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD yang tersusun	6	17,923,400	2	6,721,275									2	6,721,275	33%	38%		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													0	-	0%	0%		
5.02.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3	141,600,000	2	77,742,800									2	77,742,800	67%	55%		
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD													0	-	0%	0%		
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD yang terpenuhi	100%	1,618,205,200	100%	894,218,075	100%	266,507,830	100%	214,877,629	100%	81%			100%	1,109,095,704	100%	69%		
5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	20	450,000,000	20	330,263,200									20	330,263,200	100%	73%		
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan													0	-	0%	0%		
5.02.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pengadaan Aset Tetap Lainnya	48	468,205,200	16	175,576,950									16	175,576,950	33%	38%		
		Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan					10	266,507,830	10	214,877,629	100%	80.6%			10	214,877,629	21%	46%		

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (pada akhir periode Renstra PD) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d tahun (n-3) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)						Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Perubahan Renstra Tahun 2018-2023 s/d tahun berjalan						
							Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023		Tingkat Realisasi (%) 2023			Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2024				
			1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10 = (5+7+9)		11 =(10/4)*100
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
5.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4	700,000,000	4	388,377,925									4	388,377,925	100%	55%		
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan													0	-	0%	0%		
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Peunjang Urusan Pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	8,747,997,000	100%	6,425,487,683	100%	3,130,240,000	100%	3,029,476,508	100%	97%			100%	9,454,964,191	100%	108%		
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang disediakan	3	32,600,000	2	14,328,525									2	14,328,525	67%	44%		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					4	5,020,000	4	1,944,500	100%	38.7%			4	1,944,500	133%	6%		
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	6	539,400,000	4	360,733,716									4	360,733,716	67%	67%		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					4	269,850,000	4	237,240,653	100%	87.9%			4	237,240,653	67%	44%		
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	6	8,208,597,000	4	6,064,753,967									4	6,064,753,967	67%	74%		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					4	2,860,390,000	4	2,792,235,855	100%	97.6%			4	2,792,235,855	67%	34%		
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100%	2,951,453,600	100%	736,761,041	100%	603,473,615	100%	474,453,884	100%	79%			100%	1,211,214,925	100%	41%		
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42	1,912,846,800	28	258,125,424									28	258,125,424	67%	13%		
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					22	120,490,000	22	94,902,281	100%	78.8%			22	94,902,281	52%	5%		
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	51	266,600,000	34	143,549,317									34	143,549,317	67%	54%		
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					51	103,982,995	51	47,072,603	100%	45.3%			51	47,072,603	100%	18%		

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (pada akhir periode Renstra PD) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d tahun (n-3) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)						Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Perubahan Renstra Tahun 2018-2023 s/d tahun berjalan				
							Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023		Tingkat Realisasi (%) 2023			Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2024		
			4		5		6		7		8 = (7/6)			9		10 = (5+7+9)		11 =(10/4)*100
1	2	3	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	300	472,006,800	200	189,135,800									200	189,135,800	67%	40%
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					167	157,551,000	167	148,701,000	100%	94.4%			167	148,701,000	56%	32%
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3	300,000,000	2	145,950,500									2	145,950,500	67%	49%
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1	221,449,620	1	183,778,000	100%	83.0%			1	183,778,000	33%	61%
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase OPD yang Melaksanakan Tatakelola Keuangan Sesuai Ketentuan	100%	480,096,188,700	100%	905,473,602,925	100%	452,262,153,771	100%	450,807,455,053	100%	94%			100%	1,356,281,057,978	100%	112%
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Dokumen Rencana Anggaran Daerah Yang Tersusun Tepat Waktu/Sesuai Ketentuan	100%	12,740,972,400	100%	3,584,288,300	100%	1,794,600,000	100%	1,680,736,000	100%	94%			100%	5,265,024,300	100%	41%
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA PPAS	6	910,814,000	4	160,114,500									4	160,114,500	67%	18%
		Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun					2	43,639,000	2	41,585,500	100%	95.3%			2	41,585,500	33%	5%
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA PPAS	6	911,990,000	4	165,134,900									4	165,134,900	67%	18%
		Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun					2	43,639,000	2	41,989,100	100%	96.2%			2	41,989,100	33%	5%
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Verifikasi RKA SKPD	3	604,414,000	2	126,995,200									2	126,995,200	67%	21%
		Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi					1	17,100,000	1	16,581,600	100%	97.0%			1	16,581,600	33%	3%
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Verifikasi Perubahan RKA SKPD	3	604,414,000	2	126,995,200									2	126,995,200	67%	21%
		Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi					1	11,250,000	1	11,113,200	100%	98.8%			1	11,113,200	33%	2%

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (pada akhir periode Renstra PD) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d tahun (n-3) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)						Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Perubahan Renstra Tahun 2018-2023 s/d tahun berjalan			
							Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023		Tingkat Realisasi (%) 2023				Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2024	
							4		5		6		7		8 = (7/6)		9	
1	2	3	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Verifikasi DPA SKPD	3	63,019,000	2	58,698,625									2	58,698,625	67%	93%
		Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi					1	27,500,000	1	27,350,000	100%	99.5%			1	27,350,000	33%	43%
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Verifikasi Perubahan DPA SKPD	3	63,019,000	2	52,587,125									2	52,587,125	67%	83%
		Jumlah Perubahan DPA- SKPD yang Diverifikasi					1	64,560,550	1	64,240,000	100%	99.5%			1	64,240,000	33%	102%
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah Tentang APBD dan Perkada Penjabaran APBD	6	2,975,736,000	4	1,257,277,900									4	1,257,277,900	67%	42%
		Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD					2	535,560,000	2	513,547,200	100%	95.9%			2	513,547,200	33%	17%
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD	6	2,865,156,000	4	978,044,700									4	978,044,700	67%	34%
		Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD					2	526,089,000	2	520,079,800	100%	98.9%			2	520,079,800	33%	18%
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Analisa Standar Belanja	3	3,049,782,000	2	353,087,000									2	353,087,000	67%	12%
		Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran					1	473,692,000	1	394,672,300					1	394,672,300	33%	13%
5.02.02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	3	237,035,600	2	127,350,850									2	127,350,850	67%	54%
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan					1	37,705,450	1	36,479,100	100%	96.7%			1	36,479,100	33%	15%

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (pada akhir periode Renstra PD) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d tahun (n-3) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)						Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Perubahan Renstra Tahun 2018-2023 s/d tahun berjalan			
							Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023		Tingkat Realisasi (%) 2023				Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2024	
							6		7		8 = (7/6)		9		10 = (5+7+9)		11 =(10/4)*100	
1	2	3	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
5.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	3	219,776,400	2	89,571,150									2	89,571,150	67%	41%
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah					1	9,115,000	1	8,781,100	100%	96.3%			1	8,781,100	33%	4%
5.02.02.2.01.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	3	235,816,400	1	88,431,150									1	88,431,150	33%	38%
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan					1	4,750,000	1	4,317,100	100%	90.9%			1	4,317,100	33%	2%
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Prosentase OPD yang Menyampaikan Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%	1,473,330,200	100%	793,142,644	100%	249,825,625	100%	235,781,351	100%	94%			100%	1,028,923,995	100%	70%
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	6	92,881,600	4	52,860,500									4	52,860,500	67%	57%
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah					2	28,935,250	2	28,035,250	100%	96.9%			2	28,035,250	33%	30%
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Laporan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	6	122,804,400	4	65,641,850									4	65,641,850	67%	53%
		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD					2	35,334,000	2	33,028,000	100%	93.5%			2	33,028,000	33%	27%
5.02.02.2.02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Pembiayaan Daerah	6	167,720,000	4	65,545,100									4	65,545,100	67%	39%
		Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah					2	22,745,250	2	21,215,250	100%	93.3%			2	21,215,250	33%	13%
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	6	198,740,400	4	98,129,150									4	98,129,150	67%	49%
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya					2	54,591,025	2	50,991,000	100%	93.4%			2	50,991,000	33%	26%

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (pada akhir periode Renstra PD) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d tahun (n-3) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)						Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Perubahan Renstra Tahun 2018-2023 s/d tahun berjalan			
							Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023		Tingkat Realisasi (%) 2023				Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2024	
							6		7		8 = (7/6)		9		10 = (5+7+9)		11 =(10/4)*100	
1	2	3	4		5		K		Rp		K		Rp		K	Rp	K	Rp
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Koordinasi Dokumen Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	3	260,650,400	2	192,151,686									2	192,151,686	67%	74%
		Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)					1	1,630,000	1	1,630,000	100%	100.0%			1	1,630,000	33%	1%
5.02.02.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	3	166,250,400	2	76,931,200									2	76,931,200	67%	46%
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas					1	2,009,600	1	1,910,100	100%	95.0%			1	1,910,100	33%	1%
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	6	145,552,600	4	27,184,558									4	27,184,558	67%	19%
		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait					2	38,400,500	2	36,521,751					2	36,521,751	33%	25%
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	6	318,730,400	4	214,698,600									4	214,698,600	67%	67%

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (pada akhir periode Renstra PD) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d tahun (n-3) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)						Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Perubahan Renstra Tahun 2018-2023 s/d tahun berjalan			
							Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023		Tingkat Realisasi (%) 2023				Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2024	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10 = (5+7+9)		11 =(10/4)*100	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan					2	66,180,000	2	62,450,000	100%	94.4%			2	62,450,000	33%	20%
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Prosentase OPD yang Menyampaikan Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%	2,111,166,400	100%	762,205,990	100%	261,148,450	100%	226,688,412	100%	87%			100%	988,894,402	100%	47%
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi	3	297,703,800	1	75,000,000									1	75,000,000	33%	25%
		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban													0	-	0%	0%
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	3	270,660,000	2	100,623,762									2	100,623,762	67%	37%
		Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran					1	24,711,750	1	21,552,160	100%	87.2%			1	21,552,160	33%	8%
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	3	592,537,800	2	215,247,050									2	215,247,050	67%	36%
		Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi					1	103,131,400	1	86,557,398	100%	83.9%			1	86,557,398	33%	15%
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	3	812,488,000	2	319,668,878									2	319,668,878	67%	39%
		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota					1	88,127,800	1	80,339,544	100%	91.2%			1	80,339,544	33%	10%

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (pada akhir periode Renstra PD) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d tahun (n-3) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)						Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Perubahan Renstra Tahun 2018-2023 s/d tahun berjalan					
							Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023		Tingkat Realisasi (%) 2023				Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2024			
			1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10 = (5+7+9)		11 =(10/4)*100
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Kebijakan Akuntansi	3	137,776,800	1	51,666,300									1	51,666,300	33%	38%		
		Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah					1	45,177,500	1	38,239,310	100%	84.6%			1	38,239,310	33%	28%		
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		100%	463,770,719,700	100%	900,333,965,991	100%	449,956,579,696	100%	448,664,249,290	100%	100%			100%	1,348,998,215,281	100%	291%		
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Persentase Bantuan Keuanganyang tersalurkan	100%	451,461,639,700	100%	880,161,720,800									1	880,161,720,800	100%	195%		
		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan					4	440,307,596,700	4	440,165,145,170	100%	100%			4	440,165,145,170	400%	97%		
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Persentase Dana Darurat dan Mendesak yang tersalurkan	100%	6,000,000,000	100%	7,139,767,191									1	7,139,767,191	100%	119%		
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak					4	1,973,353,876	4	823,475,000	100%	41.7%			4	823,475,000	400%	14%		
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota yang dikelola	100%	6,309,080,000	100%	13,032,478,000									1	13,032,478,000	100%	207%		
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota					4	7,675,629,120	4	7,675,629,120	100%	100%			4	7,675,629,120	400%	122%		
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase OPD yang Tertib Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	6,360,877,800	100%	2,614,292,370	100%	721,899,136	100%	686,265,850	100%	95%			100%	3,300,558,220	100%	52%		
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Laporan BMD yang tersusun	100%	6,360,877,800	100%	2,614,292,370	100%	721,899,136	100%	686,265,850	100%	95%			100%	3,300,558,220	100%	52%		
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Buku Standar Harga	5	1,094,258,400	3	622,711,500									3	622,711,500	60%	57%		
		Jumlah Standar Harga yang Disusun					2	225,848,300	2	223,597,300	100%	99%			2	223,597,300	40%	20%		
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen tentang Validasi dan Inventarisasi BMD	3	159,443,800	2	86,711,525									2	86,711,525	67%	54%		
		Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah													0	-	0%	0%		

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (pada akhir periode Renstra PD) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d tahun (n-3) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)						Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Perubahan Renstra Tahun 2018-2023 s/d tahun berjalan			
							Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023		Tingkat Realisasi (%) 2023			Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2024	
							6		7		8 = (7/6)			9		10 = (5+7+9)	
1	2	3	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Pengamanan (Jumlah Sertifikasi Tanah), Jumlah Dokumen Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset, Jumlah Dokumen Penyelesaian TPTGR	14	3,706,421,800	8	1,154,479,891							8	1,154,479,891	57%	31%	
		Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah					4	379,761,636	4	352,602,050	100%	93%		352,602,050	29%	10%	
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen tentang Rekonsiliasi Data Laporan BMD	42	285,383,400	28	149,891,025							28	149,891,025	67%	53%	
		Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah					14	34,342,500	14	32,514,000	100%	95%		32,514,000	33%	11%	
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen tentang Laporan Pengadaan BMD	12	602,160,000	8	373,915,279							8	373,915,279	67%	62%	
		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun					4	81,946,700	4	77,552,500	100%	95%		77,552,500	33%	13%	
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pejabat yang mendapat info terkini tentangPerubahan Kebijakan Pengelolaan BMD, Jumlah Pejabat Pengelola Barang yang mendapat Sosialisasi Perundang-undangan, Jumlah orang yang mendapat Sosialisasi tentang Peningkatan Keterampilan Pengelolaan BMD	1179	513,210,400	328	226,583,150							328	226,583,150	28%	44%	
		Jumlah Pejabat yang mendapat info terkini tentangPerubahan Kebijakan Pengelolaan BMD, Jumlah Pejabat Pengelola Barang yang mendapat Sosialisasi Perundang-undangan, Jumlah orang yang mendapat Sosialisasi tentang Peningkatan Keterampilan Pengelolaan BMD											0	-	0%	0%	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM				611,059,522,423		984,701,993,922		487,658,470,882		484,018,849,350				1,468,720,843,272			

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (pada akhir periode Renstra PD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d tahun (n-3) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)						Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Perubahan Renstra Tahun 2018-2023 s/d tahun berjalan			
							Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023		Tingkat Realisasi (%) 2023				Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2024	
			1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 =(10/4)*100					
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepuasan layanan urusan Pemerintahan Daerah	85	113,484,680,697							82	37,229,062,714	92.53	7,889,924,155	109%	7%		
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi PD yang tersusun tepat waktu	100%	327,200,000							100%	30,798,600	30%	-	30%	0%		
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	44,200,000							2	2,277,650	1	-	17%	0%		
5.02.01.2.01.0002	Koordinasidan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3	57,500,000							1	13,311,850	1	-	33%	0%		
5.02.01.2.01.0003	Koordinasidan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3	57,500,000							1	13,182,700	0	-	0%	0%		
5.02.01.2.01.0004	Koordinasidan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3	30,000,000							0	-	0	-	0%	0%		
5.02.01.2.01.0005	Koordinasidan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3	30,000,000							0	-	0	-	0%	0%		
5.02.01.2.01.0006	Koordinasidan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	18	51,000,000							6	2,026,400	1	-	6%	0%		
5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24	57,000,000							0	-	0	-	0%	0%		
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan Administrasi Keuangan PD terlayani secara tepat	100%	98,423,889,957							100%	32,655,352,701	50%	6,540,471,100	50%	7%		
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51	98,318,889,957							51	32,636,603,051	51	6,527,161,600	100%	7%		
5.02.01.2.02.0005	Koordinasidan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	52,500,000							2	13,600,700	2	12,048,000	33%	23%		
5.02.01.2.02.0007	Koordinasidan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD	12	52,500,000							4	5,148,950	1	1,261,500	8%	2%		
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase barang milik daerah pada PD yang teradministrasi dengan baik	100%	50,900,000							100%	14,047,200	21%	-	21%	0%		
5.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3	27,500,000							0	-	0	-	0%	0%		

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (pada akhir periode Renstra PD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d tahun (n-3) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)						Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Perubahan Renstra Tahun 2018-2023 s/d tahun berjalan					
							Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023		Tingkat Realisasi (%) 2023				Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2024			
			1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10 = (5+7+9)		11 =(10/4)*100
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
5.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasidan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasidan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	42	23,400,000									14	14,047,200	3	-	7%	0%		
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang terlayani	100%	111,000,000									100%	6,628,363	0%	-	0%	0%		
5.02.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0	-									0	-	0	-	0%	0%		
5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	-									0	-	0	-	0%	0%		
5.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3	23,000,000									1	6,628,363	0	-	0%	0%		
5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6	51,000,000									0	-	0	-	0%	0%		
5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	201	37,000,000									0	-	0	-	0%	0%		
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tepat waktu/ sesuai standar/ ketentuan	100%	1,521,014,550									100%	265,010,850	30%	137,954,091	30%	9%		
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	53,000,000									4	5,614,200	1	-	8%	0%		
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	54	434,348,750									18	54,413,650	6	9,960,000	11%	2%		
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	116,500,000									1	10,170,000	0	1,780,000	0%	2%		
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	392,881,200									1	79,821,000	1	77,350,000	33%	20%		
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3	28,900,000									1	4,860,000	0	1,485,000	0%	5%		
5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	42,650,000									4	8,750,000	1	2,040,000	8%	5%		
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	437,481,000									4	101,382,000	1	45,339,091	8%	10%		
5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6	15,253,600									0	-	0	-	0%	0%		
5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0	-									0	-	0	-	0%	0%		

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (pada akhir periode Renstra PD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d tahun (n-3) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)						Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Perubahan Renstra Tahun 2018-2023 s/d tahun berjalan					
							Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023		Tingkat Realisasi (%) 2023				Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2024			
			1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10 = (5+7+9)		11 =(10/4)*100
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpenuhi	100%	571,763,430									100%	-	0%	-	0%	0%		
5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	-									0	-	0	-	0%	0%		
5.02.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	30	571,763,430									10	-	0	-	0%	0%		
5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	-									0	-	0	-	0%	0%		
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	10,397,370,000									100%	3,980,842,500	25%	1,183,580,831	25%	11%		
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	22,020,000									4	1,500,000	1	43,800	8%	0%		
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	539,550,000									4	237,250,000	1	65,017,577	8%	12%		
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	9,835,800,000									4	3,742,092,500	1	1,118,519,454	8%	11%		
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100%	2,081,542,760									100%	276,382,500	25%	27,918,133	25%	1%		
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	66	360,000,000									22	95,490,000	11	13,320,740	17%	4%		
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	153	430,150,000									51	87,892,500	18	4,037,393	12%	1%		
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	501	341,192,760									167	53,000,000	32	10,560,000	6%	3%		
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	950,200,000									1	40,000,000	0	-	0%	0%		
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase tahapan penyusunan APBD yang tepat waktu	100%	6,021,240,388									100%	1,150,000,000	0%	80,041,000	0%	1%		
		Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan SAP	100%	1,248,883,348,936									100%	431,195,143,876	100%	83,130,061,725	100%	7%		
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Dokumen Rencana Anggaran Daerah Yang Tersusun Tepat Waktu/Sesuai Ketentuan	100%	6,021,240,388									100%	1,150,000,000	8%	80,041,000	8%	1%		
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	6	173,417,000									2	20,965,000	0	-	0%	0%		

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (pada akhir periode Renstra PD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d tahun (n-3) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)						Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Perubahan Renstra Tahun 2018-2023 s/d tahun berjalan					
							Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023		Tingkat Realisasi (%) 2023				Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2024			
			1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10 = (5+7+9)		11 =(10/4)*100
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	6	173,417,000									2	20,965,000	0	-	0%	0%		
5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	3	59,250,000									1	13,500,000	0	-	0%	0%		
5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	3	59,250,000									1	13,500,000	0	-	0%	0%		
5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	3	120,745,000									1	20,000,000	1	19,950,000	33%	17%		
5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	3	120,745,000									0	-	0	-	0%	0%		
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	6	1,819,909,000									2	414,622,000	0	32,651,000	0%	2%		
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	6	1,742,738,388									2	384,970,000	0	7,440,000	0%	0%		
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	3	1,568,070,000									1	261,478,000	0	20,000,000	0%	1%		
5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	3	116,104,000									0	-	0	-	0%	0%		
5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	3	41,345,000									0	-	0	-	0%	0%		
5.02.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	3	26,250,000									0	-	0	-	0%	0%		
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Pembendaharaan Daerah	Persentase OPD yang melakukan penatausahaan keuangan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku	100%	529,166,250									100%	72,000,000	100%	13,461,000	100%	3%		
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	6	55,063,950									2	17,911,000	0	-	0%	0%		
5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	6	49,650,000									2	17,911,000	1	13,461,000	17%	27%		
5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	6	13,390,650									2	-	0	-	0%	0%		

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (pada akhir periode Renstra PD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d tahun (n-3) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)						Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Perubahan Renstra Tahun 2018-2023 s/d tahun berjalan					
							Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023		Tingkat Realisasi (%) 2023									
			1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10 = (5+7+9)		11 =(10/4)*100
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	6	86,345,750									2	17,911,000	0	-	0%	0%		
5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	3	13,562,300									1	18,267,000	0	-	0%	0%		
5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	3	12,349,700									1	-	0	-	0%	0%		
5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	6	50,561,350									2	-	0	-	0%	0%		
5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	6	248,242,550									2	-	0	-	0%	0%		
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase OPD yang Menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu	100%	1,026,253,100									100%	78,000,750	100%	17,474,000	100%	2%		
5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi	3	99,700,000									1	-	0	-	0%	0%		
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	3	127,045,000									1	13,827,800	0	-	0%	0%		

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (pada akhir periode Renstra PD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)						Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Perubahan Renstra Tahun 2018-2023 s/d tahun berjalan					
						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023		Tingkat Realisasi (%) 2023			Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2024			
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10 = (5+7+9)		11 =(10/4)*100	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	3	338,448,600									1	45,599,500	1	17,474,000	33%	5%
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	3	398,464,700									1	18,573,450	0	-	0%	0%
5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	3	62,594,800									1	-	0	-	0%	0%
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Prosentase Bantuan Keuangan, Dana Darurat dan mendesak yang tersalurkan	100%	1,247,327,929,586									100%	431,045,143,126	20%	83,099,126,725	20%	7%
5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12	1,211,126,549,881									4	421,161,416,700	1	83,099,126,725	8%	7%
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	6	13,000,000,000									2	804,657,000	0	-	0%	0%
5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	12	23,201,379,705									4	9,079,069,426	0	-	0%	0%
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase OPD yang Tertib Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	4,987,360,104									100%	720,000,000	100%	20,442,550	100%	0%
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Laporan BMD yang tersusun	100%	4,987,360,104									100%	720,000,000	18%	20,442,550	18%	0%
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	6	831,328,250									2	150,000,000	0	2,804,000	0%	0%
5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	42	70,522,500									0	-	0		0%	0%
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	15	3,660,120,194									5	550,000,000	1	17,638,550	7%	0%
5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	12	91,239,910									0	-	0	-	0%	0%

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (pada akhir periode Renstra PD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d tahun (n-3) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)						Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Perubahan Renstra Tahun 2018-2023 s/d tahun berjalan			
							Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023		Tingkat Realisasi (%) 2023				Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2024	
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10 = (5+7+9)		11 =(10/4)*100	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	12	248,000,000									4	20,000,000	1	-	8%	0%
5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik DaerahPemerintah Kabupaten/Kota	492	86,149,250									0		0	-	0%	0%
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM				1,373,376,630,125									470,294,206,590		91,120,469,430			

Berdasarkan tabel 2.1 dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan pada Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023 serta pada Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024. Secara umum perbedaan tersebut disebabkan karena adanya perubahan atau pergeseran pagu anggaran sehingga beberapa pagu anggaran pada sub kegiatan harus disubstitusikan pada sub kegiatan lainnya.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja 2023 dan pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2023 yang tercantum pada tabel 2.1 secara umum dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja dan realisasi anggaran untuk Renstra Tahun 2018-2023 telah tercapai. Adapun pelampauan realisasi kinerja disebabkan karena terjadinya perbedaan indikator sub kegiatan pada Tahun 2023, sedangkan pelampauan pada realisasi anggaran terjadi karena adanya penyesuaian berdasarkan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

Adapun evaluasi hasil pelaksanaan triwulan I Renja 2024 dan pencapaian Renstra Tahun 2024-2026 yang tercantum pada tabel 2.1 secara rinci dijelaskan sebagai berikut :

a. Realisasi Program/Kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

1) Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah triwulan I tahun 2024 diperoleh realisasi anggaran sebesar Rp. 83.210.102.725 dari pagu anggaran Rp. 432.345.143.878 atau 19% dari anggaran yang ditetapkan. Adapun realisasi kinerja berdasarkan masing-masing indikator, sebagai berikut :

a) Persentase tahapan penyusunan APBD yang tepat waktu, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 80.041.000 atau 6,96% dari anggaran yang ditetapkan. Adapun penilaian kinerja

karena belum sampai pada periode pelaksanaan yang menjadi indikator kinerja

- b) Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan SAP, dengan realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 83.130.061.725 atau 19,28% dari anggaran yang ditetapkan

Pelaksanaan seluruh kegiatan telah dilaksanakan berdasarkan jadwal dan penyerapan anggaran pada dokumen perencanaan. Pencapaian kinerja sampai dengan triwulan I Tahun 2024 dapat dikategorikan rendah. Hal tersebut disebabkan karena komponen yang menjadi penilaian indikator kinerja belum sampai pada periode pelaksanaan.

Beberapa faktor pendukung tercapainya kinerja adalah sebagai berikut :

- Koordinasi yang intens dengan pihak eksternal seperti Kemendagri, Kememneku, Direktorat Jenderal Pajak, seluruh OPD dan pihak berkaitan lainnya dalam rangka meningkatkan kinerja tata kelola keuangan sesuai ketentuan dan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah
- Memberikan surat teguran pada SKPD yang sering terlambat atau terlambat dalam progres pengelolaan keuangan dan aset daerah

2) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pada Program Pengelolaan Barang Milik Daerah mencapai realisasi kinerja sebesar 100%. Nilai tersebut diperoleh berdasarkan hasil dari pengukuran indikator kinerja yang ditetapkan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 20.442.550 dari Rp. 720.000.000 atau 2,84% dari anggaran yang telah ditetapkan. Pencapaian kinerja sampai dengan triwulan I Tahun 2024 sangat tinggi yaitu sebesar 100%. Hal tersebut disebabkan karena komponen yang dinilai dalam pengukuran kinerja program

pengelolaan barang milik daerah sebagian besar dilaksanakan pada triwulan I Tahun 2024. Adapun kegiatan lainnya pada program pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan sesuai jadwal yang telah direncanakan sebagai pendukung pengukuran kinerja pengelolaan barang milik daerah

3) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota diketahui bahwa realiasi kinerja pada triwulan I tahun 2024 diperoleh nilai indeks kepuasan sebesar 92,53 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.889.924.155 dari pagu anggaran Rp. 37.229.062.714 atau 21,19% dari anggaran yang ditetapkan. Data tersebut menunjukkan bahwa pelayanan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dapat memberikan kepuasan yang tinggi bagi penerima layanan.

Adapun faktor pendukung pelaksanaan program adalah :

- a) Adanya kotak saran sebagai sarana pemberian saran dan kritik untuk meningkatkan pelayanan melalui link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPoQ1VPOZwtQ7YRZHX870RYxPMY-WLs28yx398R_qua6ZzgQ/viewform?usp=sharing
- b) Pegawai yang cepat tanggap dalam memenuhi kebutuhan internal
- c) Melakukan realokasi dan refocusing berdasarkan penilaian kinerja dengan memperhatikan kebutuhan

Berdasarkan tabel 2.1 hasil evaluasi Renja tahun 2023 dapat diambil kesimpulan bahwa dalam melakukan proses perencanaan dan penganggaran diperlukan adanya analisis secara menyeluruh mengenai penetapan anggaran prioritas, *mandatory* dan kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam menunjang kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan.

Kebutuhan sarana dan prasarana yang menjadi penting adalah pengadaan atau pemeliharaan AC (*Air Conditioner*) di ruang rapat BPKAD guna mendukung konsentrasi dan kenyamanan pegawai dalam melaksanakan kegiatan rapat kerja. Selain itu BPKAD belum memiliki ruang arsip sebagai tempat penyimpanan dokumen, sementara itu beberapa gedung di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan di Jl. Soekarno Hatta No. 35 Bangkalan tidak digunakan sehingga perlu adanya realokasi anggaran beberapa kegiatan untuk dapat mengalih fungsikan gedung tersebut menjadi gudang arsip BPKAD.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan sebagai Unsur pembantu Kepala Daerah dalam menyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dituntut untuk mampu berperan dalam pengelola keuangan dan aset daerah yang dapat mengakomodasi perubahan sumber daya yang terjadi baik aspek ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan serta fisik dan prasarana secara aktual, faktual dan kontekstual, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran masyarakat.

Untuk mencapai visi dan misi yang Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan program kerja strategis 5 (lima) tahunan sebagai strategi dan kebijakan yang ditetapkan dalam core strategy dan core policy dan diwujudkan dalam beberapa program. Program yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan adalah merupakan strategi pada tingkat kebijakan.

Strategi berupa pelaksanaan program dapat dikatakan berhasil jika implementasi program tersebut sesuai dengan visi dan misi yang diemban. Sehingga adanya keterkaitan antara program Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan program tingkat Pemerintah Kabupaten Bangkalan menjadi mutlak.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan. dalam menyelenggarakan tugasnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan kebijakan teknis bidang keuangan;
- 2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan;
- 3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan;
- 4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang keuangan;
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

Dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah Secara substansial memuat berbagai kebijakan terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang bersifat komprehensif dan terpadu.

Sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan normatif, bahwa penyusunan dan pelaksanaan APBD yang berorientasi pada anggaran berbasis kinerja yaitu suatu pendekatan penganggaran yang mengutamakan keluaran / hasil dari kegiatan dan program yang akan atau telah dicapai dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, dalam hal ini setiap dana yang dianggarkan untuk kegiatan/program harus terukur secara jelas indikator kinerja yang direpresentasikan kedalam tolok ukur kinerja serta target/sasaran yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana yang terpadu dimana dalam penyusunan rencana keuangan tahunan dilakukan secara integrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan masing-masing Perangkat Daerah (PD) secara bertahap dan berkesinambungan. Hal tersebut antara lain :

1. Perlu upaya melibatkan masyarakat dalam proses Pembangunan Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan anggaran ;
2. Pengendalian pelaksanaan anggaran untuk menghindari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) Upaya mempercepat proses desentralisasi manajemen pembangunan serta pengelolaan keuangan daerah ;
3. Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelola keuangan tersebut adalah bertujuan untuk dapat lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, untuk itu semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas menjadi semangat dominan dan mewarnai penyelenggaraan pemerintahan utamanya dalam mengelola keuangan daerah. Terkait dengan hal diatas, Pemerintah Kabupaten Bangkalan telah menyusun dokumen APBD sebagai refleksi dari sasaran prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam :

- a. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- b. Kebijakan Umum Anggaran (KUA);
- c. Prioritas dan Plafon Anggaran (PPAS).

Yang selanjutnya dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan dengan hasil Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) sebagai landasan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Dimana secara aplikatif akan dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah sebagai manifestasi kepala Perangkat Daerah.

Pengembangan Sumber Daya Manusia yang merupakan faktor sangat strategis dalam menentukan keberhasilan pembangunan, peningkatannya diupayakan melalui jalur formal dan jalur non formal.

Dalam upaya efektifitas dan efisiensi pemanfaatan anggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka mengikuti study banding, undangan dalam rangka workshop, seminar dan lokakarya atas undangan atau tawaran dari organisasi/lembaga tertentu diluar instansi pemerintah supaya dilakukan secara tertib agar tidak membebani biaya perjalanan dinas dan disesuaikan dengan standar biaya perjalanan dinas yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bangkalan.

Pengelolaan dan pendayagunaan Barang Daerah dilaksanakan secara tertib dan optimal dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai berikut;

- a. Setiap Perangkat Daerah wajib mencatat seluruh aset yang pengadaannya diperoleh dari APBD Kabupaten maupun sumber dana lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Penyerahan aset hasil Belanja Langsung harus dilakukan dengan berita acara Penyerahan yaitu dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah menyerahkan kepada Bupati Bangkalan dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan mencatat sebagai inventaris Pemerintah Kabupaten Bangkalan yang dipergunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan dan selanjutnya inventarisasi terhadap seluruh aset dilakukan secara tertib dan berlanjut oleh Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan;
- c. Untuk menghindari penurunan kemampuan produktifitas dan usia teknis sarana dan prasarana yang telah dibangun, maka penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan yang disediakan hendaknya didasarkan kepada hasil inventarisasi aset yang dilaksanakan pada tahun anggaran sebelumnya, oleh karena itu inventaris terhadap setiap barang baik yang telah ada maupun yang baru dibeli harus dicatat dengan tertib dan

dilaporkan secara berkala, sedangkan Organisasi Perangkat Daerah yang bertugas melakukan inventarisasi aset perlu lebih meningkatkan ketertiban ;

- d. Dalam upaya efisiensi dan efektivitas pemanfaatan anggaran belanja, maka efisiensi pemeliharaan kendaraan bermotor ditingkatkan, disamping itu dilakukan langkah-langkah penertiban penggunaan kendaraan dinas operasional secara efektif.
- e. Penyediaan belanja barang harus didasarkan kepada Rencana Kebutuhan Barang Umum Daerah yang benar-benar sangat diperlukan dan tidak bergaya mewah, selanjutnya belanja barang harus didasarkan juga pada Daftar Kebutuhan Barang Unit (DKBU)

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah 202-2025			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase PD yang melaksanakan tata kelola keuangan sesuai ketentuan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase Peningkatan PD yang tertib Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah 2024-2025			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2024	2025	2026	2022	2023	2025	2026	
	Meningkatkan Kinerja Pemerintah melalui Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
1	Penetapan APBD tepat waktu			TEPAT WAKTU	TEPAT WAKTU	TEPAT WAKTU	TEPAT WAKTU	TEPAT WAKTU	TEPAT WAKTU	TEPAT WAKTU	
2	Penyampaian LKPD tepat waktu			2,50	2,30	2,00	TEPAT WAKTU	TEPAT WAKTU	TEPAT WAKTU	TEPAT WAKTU	
3	Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya			100%	100%	100%	2,83	2,50	2,83	2,50	
4	Nilai Sakip Perangkat Daerah			70,00	75,00	80,00	70,00	75,00	70,00	75,00	
5	Indeks Kepuasan Internal Pelayanan Kesekretariatan			92,00	93,00	95,00	92,00	93,00	92,00	93,00	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKAD

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran, dapat dilakukan dengan beberapa cara. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan memandang bahwa cara pencapaian tujuan dan sasaran dapat dilaksanakan melalui pendekatan kebijakan. Sebagai sebuah rangkaian cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi operasional yang dapat diimplementasikan diwujudkan melalui garis-garis kebijakan, rangkaian program, dan kegiatan yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Setiap strategi operasional tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang jelas sebagai suatu system operasional Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan.

Bertitik tolak dari berbagai kondisi pembangunan dan pengembangan yang akan dihadapi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan, untuk kedepan dibutuhkan solusi – solusi yang strategis.

Adapun permasalahan secara umum yang terjadi di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan adalah sebagai berikut :

- 1) Kurangnya kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia pengelola keuangan daerah.

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dalam tata kelola keuangan daerah diperlukan sesuai tuntutan perubahan. Sampai saat ini masih dirasakan kurang mampu menerima beban kerja yang diberikan sehingga diperlukan penambahan wawasan dan pengetahuan melalui pengiriman personil untuk mengikuti bimbingan teknis, workshop, pendidikan dan pelatihan yang terkait tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan;

- 2) Kurangnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.

Pelaksanaan tugas di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan sangat didukung oleh adanya sarana dan prasarana yang memadai. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan secara berkesinambungan berusaha untuk melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan terutama tempat kerja. Agar kinerja pegawai di Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan ini dapat terus ditingkatkan;

- 3) Kurang tertibnya administrasi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.

Kurang tertibnya administrasi dari petugas pengelola keuangan dan barang milik daerah mengakibatkan terganggunya perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset daerah. Sehingga menyebabkan terjadinya keterlambatan kinerja penghapusan aset di setiap Perangkat Daerah. Oleh karena itu diperlukan adanya penguatan sistem administrasi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah (BMD)

- 4) Kurangnya sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan daerah

Beban kerja yang tinggi dan kurangnya sumber daya manusia dalam melakukan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah di BPKAD Kabupaten Bangkalan mengakibatkan kinerja yang kurang maksimal sehingga dibutuhkan sumber daya manusia baru guna memudahkan tugas dan fungsi BPKAD sebagai SKPD sekaligus PPKD Kabupaten Bangkalan

- 5) Belum terintegrasinya sistem pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah

Sistem pengelolaan keuangan dan barang milik daerah masih belum dilakukan integrasi dengan menggunakan sistem aplikasi yang basis datanya berbeda. Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah maka diperlukan integrasi aplikasi keuangan dan barang milik daerah.

- 6) Belum terwujudnya sistem pelayanan pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah yang berbasis teknologi informasi

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan memiliki tugas untuk melayani dan mengkoordinasikan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah untuk SKPD di lingkungan Kabupaten Bangkalan. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan diperlukan adanya pengembangan teknologi informasi guna mempersingkat waktu pelayanan. Sehingga pengelolaan keuangan dan barang milik daerah dapat lebih akuntabel, efektif, efisien dan transparan.

Permasalahan yang belum diselesaikan pada periode tiga tahun sebelumnya menjadi isu strategis yang memiliki dampak panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Perumusan isu strategis diperoleh baik dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pengelolaan keuangan dan aset maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di periode tiga tahun mendatang. Maka isi-isu strategis utama yang perlu diperhatikan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya antara lain :

1. Perlu adanya peningkatan sistem pada SIPD penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan.
2. Perlu adanya Peningkatan kualitas SDM dalam proses Penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan.
3. Perlu adanya penguatan sistem administrasi pengelolaan barang milik daerah yang terintegrasi dengan SIPD serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

2.4 Review terhadap RKPD

Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024, menetapkan prioritas pembangunan pada Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Berdasarkan Prioritas yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kegiatan yang mendukung prioritas tersebut.

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Bangkalan	Persentase terpenuhinya Penyelenggaraan Tata Kelola Keuangan Sesuai Ketentuan	100%	444.531.669.219	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Bangkalan	Persentase terpenuhinya Penyelenggaraan Tata Kelola Keuangan Sesuai Ketentuan	100%	444.531.669.219	
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Bangkalan	Persentase Dokumen Rencana Anggaran Daerah yang tersusun tepat waktu/sesuai ketentuan	100%	750.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Bangkalan	Persentase Dokumen Rencana Anggaran Daerah yang tersusun tepat waktu/sesuai ketentuan	100%	750.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Bangkalan	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	2 Dokumen	13.000.000	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Bangkalan	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	2 Dokumen	13.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Bangkalan	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	13.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Bangkalan	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	13.000.000	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Bangkalan	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	12.000.000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Bangkalan	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	12.000.000	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Bangkalan	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	12.000.000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Bangkalan	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	12.000.000	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Bangkalan	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	10.000.000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Bangkalan	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	10.000.000	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Bangkalan	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	10.000.000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Bangkalan	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	10.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Bangkalan	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	300.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Bangkalan	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	300.000.000	

	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Bangkalan	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	300.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Bangkalan	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	300.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Bangkalan	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	55.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Bangkalan	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	55.000.000	
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Bangkalan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1 Dokumen	10.000.000	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Bangkalan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1 Dokumen	10.000.000	
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Bangkalan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen	10.000.000	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Bangkalan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen	10.000.000	
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Bangkalan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1 Dokumen	5.000.000	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Bangkalan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1 Dokumen	5.000.000	
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Bangkalan	Persentase OPD yang melakukan penatausahaan keuangan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku	100%	75.000.000	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Bangkalan	Persentase OPD yang melakukan penatausahaan keuangan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku	100%	75.000.000	
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Bangkalan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	2 Dokumen	10.000.000	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Bangkalan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	2 Dokumen	10.000.000	
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Bangkalan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	2 Dokumen	10.000.000	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Bangkalan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	2 Dokumen	10.000.000	
	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Bangkalan	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	2 Dokumen	5.000.000	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Bangkalan	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	2 Dokumen	5.000.000	

	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Bangkalan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	2 Dokumen	10.000.000	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Bangkalan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	2 Dokumen	10.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Bangkalan	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	1 Laporan	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Bangkalan	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	1 Laporan	10.000.000	
	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Bangkalan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1 Dokumen	5.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Bangkalan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1 Dokumen	5.000.000	
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Bangkalan	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	2 Dokumen	15.000.000	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Bangkalan	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	2 Dokumen	15.000.000	

	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Bangkalan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	2 Dokumen	10.000.000	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Bangkalan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	2 Dokumen	10.000.000	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Bangkalan	Persentase OPD yang Menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu	100%	75.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Bangkalan	Persentase OPD yang Menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu	100%	75.000.000	
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Bangkalan	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	1 Dokumen	15.000.000	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Bangkalan	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	1 Dokumen	15.000.000	
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Bangkalan	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1 Laporan	15.000.000	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Bangkalan	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1 Laporan	15.000.000	
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Bangkalan	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	25.000.000	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Bangkalan	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	25.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Bangkalan	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban	1 Dokumen	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Bangkalan	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban	1 Dokumen	10.000.000	

			Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			Kabupaten/Kota		Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Bangkalan	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	10.000.000	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Bangkalan	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	10.000.000	
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Bangkalan	Prosentase Bantuan Keuangan, Dana Darurat dan mendesak yang tersalurkan	100%	443.631.669.219	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Bangkalan	Prosentase Bantuan Keuangan, Dana Darurat dan mendesak yang tersalurkan	100%	443.631.669.219	
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Bangkalan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan danPenyaluran Bantuan Keuangan	4 Laporan	427.649.884.700	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Bangkalan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan danPenyaluran Bantuan Keuangan	4 Laporan	427.649.884.700	
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Bangkalan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2 Laporan	2.500.000.000	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Bangkalan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2 Laporan	2.500.000.000	
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Bangkalan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagiHasil Kabupaten/Kota	4 Laporan	13.481.784.519	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Bangkalan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagiHasil Kabupaten/Kota	4 Laporan	13.481.784.519	
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Bangkalan	Persentase PD yang tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah	100%	720.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Bangkalan	Persentase PD yang tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah	100%	720.000.000	
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Bangkalan	Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang tersusun	100%	720.000.000	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Bangkalan	Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang tersusun	100%	720.000.000	
	Penyusunan Standar Harga	Bangkalan	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	150.000.000	Penyusunan Standar Harga	Bangkalan	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	150.000.000	
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Bangkalan	Jumlag Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	14 Laporan	15.000.000	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Bangkalan	Jumlag Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	14 Laporan	15.000.000	
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan,Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Bangkalan	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan	5 Dokumen	500.000.000	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan,Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Bangkalan	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan	5 Dokumen	500.000.000	

			Penghapusan Barang Milik Daerah					Penghapusan Barang Milik Daerah			
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Bangkalan	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4 Laporan	15.000.000	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Bangkalan	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4 Laporan	15.000.000	
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Bangkalan	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	4 Laporan	25.000.000	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Bangkalan	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	4 Laporan	25.000.000	
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Bangkalan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	164 orang	15.000.000	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Bangkalan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	164 orang	15.000.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Bangkalan	Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	83	43.632.630.782	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Bangkalan	Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	83	43.632.630.782	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bangkalan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi PD yang tersusun tepat waktu	100%	32.503.750	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bangkalan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi PD yang tersusun tepat waktu	100%	32.503.750	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bangkalan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.786.250	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bangkalan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.786.250	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Bangkalan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.506.250	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Bangkalan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.506.250	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Bangkalan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.506.250	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Bangkalan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.506.250	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Bangkalan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil	1 Dokumen	4.066.250	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Bangkalan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil	1 Dokumen	4.066.250	

			Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD					Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD			
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Bangkalan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.066.250	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Bangkalan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.066.250	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bangkalan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	4.506.250	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bangkalan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	4.506.250	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bangkalan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	4.066.250	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bangkalan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	4.066.250	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bangkalan	Persentase layanan administrasi keuangan PD terlayani tepat waktu	51 Orang/bulan	38.998.265.402	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bangkalan	Persentase layanan administrasi keuanagn PD terlayani tepat waktu	51 Orang/bulan	38.998.265.402	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bangkalan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang/bulan	38.989.018.152	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bangkalan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang/bulan	38.989.018.152	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bangkalan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	6.331.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bangkalan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	6.331.500	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Bangkalan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 Laporan	2.915.750	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Bangkalan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 Laporan	2.915.750	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Bangkalan	Prosentase barang milik daerah pada Perangkat	100%	7.271.500	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Bangkalan	Prosentase barang milik daerah pada Perangkat	100%	7.271.500	

			Daerah yang teradministrasi dengan baik					Daerah yang teradministrasi dengan baik			
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Bangkalan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.915.750	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Bangkalan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.915.750	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bangkalan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Laporan	4.355.750	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bangkalan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Laporan	4.355.750	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bangkalan	Persentase administrasi kepegawaian yang terlayani	100%	25.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bangkalan	Persentase administrasi kepegawaian yang terlayani	100%	25.000.000	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Bangkalan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	5.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Bangkalan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	5.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Bangkalan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	10.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Bangkalan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	10.000.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Bangkalan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	67 Orang	10.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Bangkalan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	67 Orang	10.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bangkalan	Persentase layanan Administrasi umum tepat waktu/sesuai standard/ketentuan	100%	320.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bangkalan	Persentase layanan Administrasi umum tepat waktu/sesuai standard/ketentuan	100%	320.000.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bangkalan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	5.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bangkalan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	5.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bangkalan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18 Paket	80.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bangkalan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18 Paket	80.000.000	

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bangkalan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bangkalan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bangkalan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	80.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bangkalan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	80.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bangkalan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang Disediakan	1 Dokumen	6.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bangkalan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang Disediakan	1 Dokumen	6.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bangkalan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	9.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bangkalan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	9.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bangkalan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	120.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bangkalan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	120.000.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Bangkalan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	5.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Bangkalan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	5.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bangkalan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpenuhi	100%	65.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bangkalan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpenuhi	100%	65.000.000	
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Bangkalan	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	10 Unit	65.000.000	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Bangkalan	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	10 Unit	65.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bangkalan	Persentase Jasa Peunjang Urusan Pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	3.914.090.130	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bangkalan	Persentase Jasa Peunjang Urusan Pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	3.914.090.130	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bangkalan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	2.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bangkalan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	2.500.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bangkalan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	269.850.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bangkalan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	269.850.000	

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bangkalan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	3.641.740.130	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bangkalan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	3.641.740.130	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bangkalan	Prosentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100%	270.500.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bangkalan	Prosentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100%	270.500.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bangkalan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	22 Unit	95.500.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bangkalan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	22 Unit	95.500.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bangkalan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapang yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	51 Unit	90.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bangkalan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapang yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	51 Unit	90.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bangkalan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	167 Unit	35.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bangkalan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	167 Unit	35.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bangkalan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bangkalan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000	
Jumlah					488.884.300.001					488.884.300.001	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan Kegiatan disusun berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya dan disamping itu penyusunan program dan kegiatan telah dikaitkan dengan isu-isu penting tugas pokok dan fungsi BPKAD sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan yang selanjutnya dijabarkan kedalam Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja BPKAD Kabupaten Bangkalan, maka BPKAD Kabupaten Bangkalan untuk perencanaan program dan kegiatan tahun 2025 tidak melakukan pengumpulan usulan program dan kegiatan masyarakat karena hanya menjalankan kegiatan yang bersifat rutinitas.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Bangkalan

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		NIHIL			

BAB III

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun (SPPN), rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu Paralel dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap PD membuat dan memiliki Renja-PD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra-PD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Selanjutnya, terkait dengan kebijakan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, tidak terlepas dari amanah Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang diterjemahkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 77 /PMK.01/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 yang telah disempurnakan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 87 /Pmk.01/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 77 /PMK.01/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi.

Capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat , Mandiri dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong”. Adapun upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 5 (lima) misi pembangunan yaitu:

1. Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan.
2. Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif.
3. Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif.

4. Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum.
5. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

Adapun 7 agenda pembangunan dalam mendukung misi pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
2. Melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
3. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan mendorong kemandirian Bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
4. Membangun dari Desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
5. Memperkokoh Idiologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia;
6. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekhniologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Ksetaraan Gender serta penguatan peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z) dan Penyandang Disabilitas;
7. Memperkuat penyelerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur
8. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.

Dari Delapan (8) agenda tersebut sesuai dengan Prioritas Pembangunan Nasional yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan program pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah *“Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan”*. Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan sumber daya manusia sebagai pelaksana teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah perlu ditingkatkan, sehingga dapat Transformasi Pelayanan Publik guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah sebagaimana diharapkan. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

Sedangkan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur dalam mendukung Prioritas Pembangunan Nasional adalah sebagai berikut :

1. Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial,
2. Perluasan lapangan kerja dan membangun keunggulan ekonomi,
3. Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor pendidikan dan kesehatan,
4. Keterpaduan pengembangan wilayah.
5. pembangunan karakter masyarakat yang berbasis nilai-nilai kesalehan sosial, budi pekerti luhur dan berintegritas,
6. Pembangunan sektor pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, perkebunan berbasis kerakyatan,
7. Pembangunan ekonomi kerakyatan dengan basis umkm, koperasi, bumdesa dan mendorong pemberdayaan pemerintahan desa
8. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif dan anti korupsi
9. Menjaga harmoni sosial dan alam dengan melestarikan kebudayaan dan lingkungan hidup

Dari sembilan (9) agenda tersebut sesuai dengan Prioritas Pembangunan Nasional yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan program pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah "*Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif dan anti korupsi*" Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan sumber daya manusia sebagai pelaksana teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah perlu ditingkatkan, sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan antikorupsi.

Sedangkan prioritas pembangunan Kabupaten Bangkalan adalah :

1. penurunan angka kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja,
2. pembangunan pelayanan dasar berkualitas di bidang pendidikan dan kesehatan,
3. pembangunan infrastruktur berkualitas dan merata,
4. pembangunan karakter masyarakat yang berbasis nilai kesalehan sosial, budi pekerti luhur dan berintegritas,
5. peningkatan sarana prasarana pertanian dalam arti luas berbasis kerakyatan,
6. pembangunan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Usaha Mikro, Koperasi BUMDes dan mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa,
7. Tata kelola pemerintahan yang efektif dan melayani,
8. Pembangunan Kualitas Lingkungan Hidup.

Dari 8 (delapan) agenda tersebut sesuai dengan Prioritas Pembangunan Nasional yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan program pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah *“Tata kelola pemerintahan yang efektif dan melayani”* Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan sumber daya manusia sebagai pelaksana teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah perlu ditingkatkan, sehingga dapat terciptanya tata kelola pemerintahan yang efektif dan melayani.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi yang diemban, tujuan adalah suatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Penetapan tujuan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan harus selaras dengan visi Pemerintah Provinsi Jawa Timur **“Terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan partisipatoris inklusif melalui kerja bersama dan semangat gotong royong”** dengan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur yaitu Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Jawa Timur. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Bangkalan menyusun rancangan tujuan pembangunan Daerah yang terdiri dari:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
2. Menurunkan angka kemiskinan
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif yang didukung oleh peningkatan infrastruktur berwawasan lingkungan
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

Dalam rangka mencapai tujuan Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan berpedoman pada prioritas pembangunan kabupaten Bangkalan yaitu peningkatan pelayanan publik, reformasi birokrasi dan ketentraman ketertiban umum, tujuan yang ingin dicapai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan adalah **“Meningkatkan Kinerja Pemerintah melalui Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah”**

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara teratur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Adapun sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam perencanaan strategi organisasi. Sasaran tersebut harus berisi pernyataan apa yang ingin dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu. Adapun sasaran

yang ingin dicapai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- b. Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tujuan				Sasaran				Ket.
Uraian	Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Target		
		2024	2025			2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan Kinerja Pemerintah melalui Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Penetapan APBD tepat waktu	100%	100%	
					Penyampaian LKPD tepat waktu	100%	100%	
					Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	2.83	2.50	
				Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	65.00	70.00	
					Indeks Kepuasan Internal Pelayanan Kesekretariatan	90.00	92.00	

3.3 Program dan Kegiatan

Wabah Covid-19 sejak tahun 2020 memberikan dampak negatif pada berbagai aspek kehidupan khususnya dalam aspek kesehatan dan perekonomian bangsa Indonesia. Dalam menghadapi situasi yang dinamis tersebut, Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan respon yang adaptif dalam menentukan langkah-langkah yang diambil, sehingga tercipta kebijakan terbaik dalam menangani permasalahan tersebut. Secara garis besar, terdapat dua dimensi utama dalam memberikan stimulus penanganan covid-19 yaitu penanganan kesehatan dan penanganan ekonomi. Dalam rangka menangani permasalahan ekonomi, kementerian keuangan mengusulkan strategi kebijakan berupa program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sehingga program/kegiatan pemerintah daerah harus integral dengan kebijakan ekonomi nasional.

Adapun rekapitulasi program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan dalam rangka mendukung kebijakan ekonomi nasional dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang inklusif, disebutkan sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri dari 4 kegiatan yaitu:
 - a. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
 - b. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
 - c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
 - d. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah hanya terdiri dari 1 kegiatan yaitu Pengelolaan Barang Milik Daerah
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota, terdiri dari 8 kegiatan, yaitu:
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Tabel 3.2

Strategi dan Kebijakan Program Kegiatan Perangkat Daerah

Strategi	Kebijakan
4	5
Meningkatkan efektivitas dan kinerja melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan.	Membuat mekanisme analisa kebutuhan dan ketersediaan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana yang berbasis teknologi informasi.
Memberdayakan SDM secara maksimal dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi	Melibatkan keaktifan SDM dalam kegiatan dan memberikan pendidikan/pelatihan khusus
Mengoptimalkan ketersediaan alokasi anggaran sesuai dengan tupoksi dan kewenangan yang dimiliki	Penyerapan anggaran secara efektif, efisien, dengan kinerja yang optimal
Melakukan monitoring secara intens sesuai dengan SOP yang tersedia dalam pelaksanaan pengendalian Penyusunan Anggaran dan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	Pemanfaatan teknologi untuk evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Penyusunan Anggaran, Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAN Pengelolaan Barang Milik Daerah
Meningkatkan efektivitas dan kinerja melalui peningkatan penatalaksanaan, tata kelola administrasi perencanaan dan pengendalian Penyusunan Anggaran	Meningkatkan kualitas data dan informasi pembangunan daerah untuk mendukung perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.
Memaksimalkan kewenangan pengendalian Penyusunan Anggaran sehingga pemanfaatan dana yang dilakukan oleh SKPD berjalan dengan optimal	Melakukan kajian dan analisis untuk rekomendasi kebijakan serta melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan
Optimalisasi kapasitas Aparatur Pemerintahan terhadap perkembangan teknologi dengan pelatihan khusus	melakukan monitoring dan evaluasi secara intens dan berkelanjutan sekaligus memberikan solusi terhadap kendala yang ada
Meningkatkan tata kelola administrasi khususnya yang terkait dengan manajemen process bussiness	Melakukan pendampingan dan sebagai mitra atau verifikator terhadap seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan yang dilakukan SKPD
Sosialisasi dan menyamakan pemahaman terhadap proses bisnis	Mengikutsertakan aparatur dalam kegiatan seminar/pendidikan

SKPD dalam pelaksanaan kegiatan sebagai salah satu wujud pengendalian	pelatihan dan sejenisnya.
Peningkatan pemahaman aparatur dan SKPD terhadap alur bisnis proses kegiatan Penyusunan Anggaran dan regulasi yang mengaturnya.	Manajemen dokumen administrasi yang lengkap dan terkini
	Mengadakan workshop serta pendampingan oleh narasumber/pakar/ahli
	Menyusun Analisa Standar Belanja, Standar Harga dan Regulasi yang mendukung kinaerja Perangkat Daerah

BAB IV

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

4.1 Program dan Kegiatan

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi BPKAD Kabupaten Bangkalan, dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari Suatu Program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, proses, output, outcome maupun impact sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan. Adapun Program dan Kegiatan pada BPKAD Kabupaten Bangkalan sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Laporan Keuangan yang sesuai ketentuan Persentase tahapan penyusunan APBD yang tepat waktu	Bangkalan	100% 100%	444.531.669.219	DAUM		100% 100%	444.531.669.219
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Dokumen Rencana Anggaran Daerah yang tersusun tepat waktu/sesuai ketentuan	Bangkalan	100%	750.000.000	DAUM		100%	750.000.000
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	Bangkalan	2 Dok	13.000.000	DAUM		2 Dokumen	13.000.000
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Bangkalan	2 Dok	13.000.000	DAUM		2 Dokumen	13.000.000
5.02.02.2.01.03	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Bangkalan	1 Dok	12.000.000	DAUM		1 Dokumen	12.000.000
5.02.02.2.01.04	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Bangkalan	1 Dok	12.000.000	DAUM		1 Dokumen	12.000.000
5.02.02.2.01.05	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Bangkalan	1 Dok	10.000.000	DAUM		1 Dokumen	10.000.000
5.02.02.2.01.06	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Bangkalan	1 Dok	10.000.000	DAUM		1 Dokumen	10.000.000
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Bangkalan	2 Dok	300.000.000	DAUM		2 Dokumen	300.000.000
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Bangkalan	2 Dok	300.000.000	DAUM		2 Dokumen	300.000.000
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Bangkalan	1 Dok	55.000.000	DAUM		1 Dokumen	55.000.000
5.02.02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Bangkalan	1 Dok	10.000.000	DAUM		1 Dokumen	10.000.000

5.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Bangkalan	1 Dok	10.000.000	DAUM		1 Dokumen	10.000.000
5.02.02.2.01.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Bangkalan	1 Dok	5.000.000	DAUM		1 Dokumen	5.000.000
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase OPD yang melakukan penatausahaan keuangan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku	Bangkalan	100%	75.000.000	DAUM		100%	75.000.000
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Bangkalan	2 Dok	10.000.000	DAUM		2 Dokumen	10.000.000
5.02.02.2.02.03	Penyiapan Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Bangkalan	2 Dok	10.000.000	DAUM		2 Dokumen	10.000.000
5.02.02.2.02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Bangkalan	2 Dok	5.000.000	DAUM		2 Dokumen	5.000.000
5.02.02.2.02.05	Koordinasi Fasilitasi Asistensi Sinkronisasi Supervisi Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Bangkalan	2 Dok	10.000.000	DAUM		2 Dokumen	10.000.000
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Bangkalan	1 Laporan	10.000.000	DAUM		1 Laporan	10.000.000
5.02.02.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Bangkalan	1 Dok	5.000.000	DAUM		1 Dokumen	5.000.000
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Bangkalan	2 Dok	15.000.000	DAUM		2 Dokumen	15.000.000
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Bangkalan	2 Dok	10.000.000	DAUM		2 Dokumen	10.000.000
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase OPD yang Menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu	Bangkalan	100%	75.000.000	DAUM		100%	75.000.000

5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Bangkalan	1 Dok	15.000.000	DAUM		1 Dokumen	15.000.000
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Bangkalan	1 Laporan	15.000.000	DAUM		1 Laporan	15.000.000
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Bangkalan	1 Laporan	25.000.000	DAUM		1 Laporan	25.000.000
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Bangkalan	1 Dok	10.000.000	DAUM		1 Dokumen	10.000.000
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Bangkalan	1 Dok	10.000.000	DAUM		1 Dokumen	10.000.000
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Prosentase Bantuan Keuangan, Dana Darurat dan mendesak yang tersalurkan	Bangkalan	100%	443.631.669.219	DAUM		100%	443.631.669.219
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Bangkalan	4 Laporan	427.649.884.700	DAUM		4 Laporan	427.649.884.700
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Bangkalan	2 Laporan	2.500.000.000	DAUM		2 Laporan	2.500.000.000
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Bangkalan	4 Laporan	13.481.784.519	DAUM		4 Laporan	13.481.784.519
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase PD yang tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah	Bangkalan	100%	720.000.000	DAUM		100%	720.000.000
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang tersusun	Bangkalan	100%	720.000.000	DAUM		100%	720.000.000
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Bangkalan	2 Dok	150.000.000	DAUM		2 Dokumen	150.000.000
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Bangkalan	14 Laporan	15.000.000	DAUM		14 Laporan	15.000.000
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan Pemindahtanganan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Bangkalan	5 Dok	500.000.000	DAUM		5 Dokumen	500.000.000

5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Bangkalan	4 Laporan	15.000.000	DAUM		4 Laporan	15.000.000
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Bangkalan	4 Laporan	25.000.000	DAUM		4 Laporan	25.000.000
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Bangkalan	164 Org	15.000.000	DAUM		164 orang	15.000.000
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Bangkalan	83.00 Indeks	43.632.630.782	DAUM		85.00 Indeks	43.632.630.782
5.02.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi PD yang tersusun tepat waktu	Bangkalan	100%	32.503.750	DAUM		100%	32.503.750
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bangkalan	2 Dok	4.786.250	DAUM		2 Dokumen	4.786.250
5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Bangkalan	1 Dok	5.506.250	DAUM		1 Dokumen	5.506.250
5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Bangkalan	1 Dok	5.506.250	DAUM		1 Dokumen	5.506.250
5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD	Bangkalan	1 Dok	4.066.250	DAUM		1 Dokumen	4.066.250
5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Bangkalan	1 Dok	4.066.250	DAUM		1 Dokumen	4.066.250
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bangkalan	6 Laporan	4.506.250	DAUM		6 Laporan	4.506.250
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bangkalan	8 Laporan	4.066.250	DAUM		8 Laporan	4.066.250
5.02.01.02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi keuangan PD terlayani tepat waktu	Bangkalan	100%	38.998.265.402	DAUM		51Orang/bulan	38.998.265.402
5.02.01.02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bangkalan	51 Orang/bulan	38.989.018.152	DAUM		2 Laporan	38.989.018.152
5.02.01.02.02.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bangkalan	2 Laporan	6.331.500	DAUM		4 Laporan	6.331.500

5.02.01.02.02.03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD	Bangkalan	4 Laporan	2.915.750	DAUM		51Orang/bulan	2.915.750
5.02.01.2.03		Prosentase barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang teradministrasi dengan baik	Bangkalan	100%	7.271.500	DAUM		100%	7.271.500
5.02.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Bangkalan	1 Dok	2.915.750	DAUM		1 Dokumen	2.915.750
5.02.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bangkalan	14 Laporan	4.355.750	DAUM		14 Laporan	4.355.750
5.02.01.02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang terlayani	Bangkalan	100%	25.000.000	DAUM		100%	25.000.000
5.02.01.02.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Bangkalan	1 Dok	5.000.000	DAUM		1 Dokumen	5.000.000
5.02.01.02.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Bangkalan	2 org	10.000.000	DAUM		2 Orang	10.000.000
5.02.01.02.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Bangkalan	67 org	10.000.000	DAUM		67 Orang	10.000.000
5.02.01.02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan Administrasi umum tepat waktu/sesuai standard/ketentuan	Bangkalan	100%	320.000.000	DAUM		100%	320.000.000
5.02.01.02.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Bangkalan	4 Paket	5.000.000	DAUM		4 Paket	5.000.000
5.02.01.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bangkalan	18 Paket	80.000.000	DAUM		18 Paket	80.000.000
5.02.01.02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bangkalan	1 Paket	15.000.000	DAUM		1 Paket	15.000.000
5.02.01.02.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Bangkalan	1 Paket	80.000.000	DAUM		1 Paket	80.000.000
5.02.01.02.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang Disediakan	Bangkalan	1 Dok	6.000.000	DAUM		1 Dokumen	6.000.000
5.02.01.02.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bangkalan	4 Laporan	9.000.000	DAUM		4 Laporan	9.000.000
5.02.01.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bangkalan	4 Laporan	120.000.000	DAUM		4 Laporan	120.000.000
5.02.01.02.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Bangkalan	2 Dok	5.000.000	DAUM		2 Dokumen	5.000.000

5.02.01.02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpenuhi	Bangkalan	100%	65.000.000	DAUM		100%	65.000.000
5.02.01.02.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Bangkalan	10 Unit	65.000.000	DAUM		10 Unit	65.000.000
5.02.01.02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Peunjang Urusan Pemerintahan daerah yang terpenuhi	Bangkalan	100%	3.914.090.130	DAUM		100%	3.914.090.130
5.02.01.02.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bangkalan	4 Laporan	2.500.000	DAUM		4 Laporan	2.500.000
5.02.01.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bangkalan	4 Laporan	269.850.000	DAUM		4 Laporan	269.850.000
5.02.01.02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bangkalan	4 Laporan	3.641.740.130	DAUM		4 Laporan	3.641.740.130
5.02.01.02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	Bangkalan	100%	270.500.000	DAUM		100%	270.500.000
5.02.01.02.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Bangkalan	22 Unit	95.500.000	DAUM		22 Unit	95.500.000
5.02.01.02.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapang yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Bangkalan	51 Unit	90.000.000	DAUM		51 Unit	90.000.000
5.02.01.02.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Bangkalan	167 Unit	35.000.000	DAUM		167 Unit	35.000.000
5.02.01.02.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bangkalan	1 Unit	50.000.000	DAUM		1 Unit	50.000.000
Jumlah					488.884.300.001	Jumlah		488.884.300.001	

Berdasarkan tabel 4.1 di atas yang menjadi prioritas berdasarkan tujuan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk Meningkatkan Kinerja Pemerintah melalui Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, adalah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjadi prioritas adalah kegiatan dari bidang anggaran dan kegiatan dari bidang akuntansi dan perbendaharaan. Kegiatan dari bidang anggaran yang menjadi prioritas yaitu Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah yang terdiri dari sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 600.303.000,- serta Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 572.786.194,-. Sub kegiatan tersebut menjadi prioritas karena APBD yang tersusun menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan serta dalam rangka mewujudkan efisiensi anggaran pendapatan dan belanja.

Adapun kegiatan dari bidang akuntansi dan perbendaharaan yang menjadi prioritas yaitu Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah pada sub kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan pagu sebesar Rp. 115.816.200,-. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menjadi prioritas sebab LKPD merupakan bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah untuk mengukur capaian kinerja dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja yang telah ditetapkan dalam APBD.

2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pada Program Pengelolaan Barang Milik Daerah yang menjadi prioritas adalah kegiatan dari bidang administrasi aset pada sub kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.020.000.000,-. Sub kegiatan ini menjadi prioritas karena pentingnya legalisasi aset tanah milik Pemerintah Daerah untuk mencegah terjadinya sengketa tanah dan mengoptimalkan pengelolaan tanah sebagai aset milik penda untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Rekapitulasi tanah dalam rangka legalisasi atau sertifikasi tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 4.2 Rekapitulasi Aset Tanah Milik Pemerintah Kabupaten
Bangkalan**

No.	Tahun	Akumulasi Sertifikat	Sertifikat	Akumulasi Bidang Bersertifikat	Bidang Belum Bersertifikat	Target Sertifikasi Bidang	Jumlah Aset (Bidang)
1.	2023	520	47	441	1229	156	1826
2.	2023	567	57	597	1172	57	1826
3.	2024	624	290	654	882	290	1826
4.	2025	914	441	944	441	441	1826
5.	2026	1355	441	1385	0	441	1826

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa pada tahun 2024 terdapat perbedaan antara target bidang yang disertifikasi dengan jumlah sertifikat. Perbedaan tersebut terjadi karena 34 bidang atau tanah yang merupakan fasilitas umum dan fasilitas sosial milik Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman diusulkan menjadi 4 sertifikat. Pada tahun 2023-2026 rincian target sertifikasi bidang direncanakan selaras dengan jumlah sertifikat yang diterbitkan.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun pertama dari Rencana Strategis BPKAD Tahun 2024-2028, berdasarkan RPJMD Kabupaten Bangkalan 2024-2028, sehingga tahun ini merupakan awal perencanaan target kinerja.

Target kinerja Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang dicantumkan dalam RPJMD berkaitan dengan Tingkat Kinerja yang ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program PD secara umum dalam rangka memberikan kepastian operasional dan keterkaitan terhadap peran misi serta program yang telah ditetapkan.

Penetapan Renja PD yang berada dipertengahan tahun anggaran memiliki rentang waktu yg cukup lama dengan proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, hal ini tentunya memberikan peluang adanya pergeseran atau perubahan rencana yang akan dilakukan pada proses penganggaran dalam RAPBD. Hal tersebut dapat disebabkan oleh faktor eksternal dan internal di Kabupaten Bangkalan, antara lain :

- a. Perubahan kebijakan atau Peraturan dan Perundangan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- b. Perkembangan dan dinamika yang terjadi pada masyarakat;
- c. Ketersediaan anggaran yang tersedia;
- d. Dan beberapa hal lain yang mempengaruhi kebijakan penganggaran.

Selanjutnya kami juga menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan rencana kerja ini masih banyak kekurangan, sehingga saran dan kritik yang konstruktif sangat kami harapkan dan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja BPKAD Kabupaten Bangkalan tahun 2025, kami sampaikan banyak terima kasih semoga dokumen rencana kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan tahun 2025 bermanfaat sebagaimana mestinya

Bangkalan, 15 Juni 2024

**KEPALA BPKAD
KABUPATEN BANGKALAN**

ABDUL AZIZ, S.Si
NIP. 19740729 200312 1 006

Formulir E.29
PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN
PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN

NO	JENIS KEGIATAN	HASIL PENGENDALIAN DAN EVALUASI			
		KESESUAIAN		FAKTOR PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN	TINDAK LANJUT PENYEMPURNAAN APABILA TIDAK
		ADA	TIDAK ADA		
1	2	3	4	5	6
1	Pembentukan Tim Penyusun Renja Perangkat daerah	√			
2	Pengelolaan data dan informasi	√			
3	Analisis gambaran pelayanan perangkat daerah	√			
4	Mengkaji hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah	√			
5	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat	√			
6	Penelaahan Rancangan Awal RKPD	√			
7	Perumusan tujuan dan sasaran	√			
8	Penelaahan usulan masyarakat	√			
9	Perumusan kegiatan prioritas	√			
10	Pelaksanaan Forum Perangkat daerah/Lintas Perangkat daerah	√			
10.a	Menyeleraskan program dan kegiatan Perangkat daerah Propinsi dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kota/Kabupaten	√			
10.b	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah	√			
10.c	Mensinkronkan program dan kegiatan antar perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan	√			
10.d	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif	√			
11	Sasaran program dan kegiatan perangkat daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu	√			
12	Program dan kegiatan antar perangkat daerah dengan perangkat daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum perangkat daerah	√			
13	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah telah menyusun dan memperhitungkan perkiraan maju	√			
14	Dokumen renja perangkat daerah yang telah disahkan		√		

Bangkalan, 15 Juni 2024

KEPALA BPKAD
KABUPATEN BANGKALAN

ABDUL AZIZ, S.Si
NIP. 19740729 200312 1 006